



PERUBAHAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2024

INSPEKTORAT UTAMA



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/752/VI/KA/PR.01.01/2024/BNN

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel serta sebagai tindak lanjut operasional kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 maka diperlukan adanya penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

/3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
14. Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2023;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor: SP DIPA-066.01.1.681600/2024 tanggal 24 November 2023;
16. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1125/XII/KA/PR.01/2023/BNN tanggal 19 Oktober 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : memberlakukan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 serta tidak mengganti Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1125/XII/KA/PR.01/2023/BNN tanggal 19 Oktober 2023 tentang Program Kerja Pengawasan

/Tahunan.....

Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 namun merubah Objek Pengawasan, Fokus Pengawasan atas pengenaaan kegiatan keauditan di wilayah tugas Inspektorat I, II, dan III yang dilaksanakan terhitung mulai semester kedua tahun 2024.

KEDUA : perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak merubah dan/atau mengganti rencana kegiatan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus serta bidang manajemen yang dikelola oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2024 dan akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan dan Pengesahan Program Kerja Audit Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN;
2. Para Inspektur Inspektorat Utama BNN.

Ditetapkan di : J a k a r t a

pada tanggal : 25 Juni 2024

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
INSPEKTUR UTAMA**



Drs. WAHYONO, M.H., CFA., CGCAE.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/ /VI/IR/PR.01.01/2024/BNN
TANGGAL: JUNI 2024

PERUBAHAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penyesuaian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian dimaksud dilakukan dalam rangka Inspektorat Utama menjawab tantangan kebijakan Kepala Badan Narkotika Nasional Drs. Marthinus Hukom, M.Si. tentang Program Intervensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 7 Provinsi Rawan melalui 4 Komitmen yaitu:

1. Membangun Ketahanan Masyarakat Antinarkoba di Pesisir Pantai Sumatera Utara;
2. Membangun Kekuatan Hukum dan Intelijen Perbatasan Malaysia;
3. Penguatan Media Sosial; dan
4. Pendekatan Rehabilitasi dengan Penggunaan Mobil Keliling.

Kebijakan Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut diterjemahkan ke dalam bidang Pengawasan Intern sebagai Penetapan Lokus Pengawasan Intern. Oleh karena penetapan Lokus Pengawasan lebih dahulu, maka kebijakan Pengawasan Intern mengalami penyesuaian di area Prioritas Objek Pengawasan Intern dan Fokus Pengawasan Intern terutama pada penetapan Fokus Audit di 7 Provinsi Rawan tersebut.

Penyusunan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 ini tidak terlepas dari masukan dan dukungan dari seluruh entitas Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada para Inspektur, Auditor Ahli Utama, Kepala Bagian Tata Usaha, para Pengendali Teknis, para Ketua Tim, para Auditor, serta seluruh pegawai Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional.

Akhir kata, saya berharap Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Utama BNN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal di semester kedua tahun 2024.

Jakarta, 25 Juni 2024
Inspektur Utama BNN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a short vertical stroke.

Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tugas Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	3
F. Subjek Pengawasan Intern dan Peran Dalam Pengawasan	3
G. Wilayah dan Objek Pengawasan Intern	3
H. Ketentuan Umum	6
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN T.A. 2024	7
A. Mandatory Pengawasan Intern	8
B. Penetapan Pola Pengawasan Intern	9
C. Penetapan Bidang Tugas Koordinator Pengawasan	11
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN	12
A. Audit	12
B. Reviu	12
C. Evaluasi	12
D. Pemantauan	12
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	12

BAB IV	PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT 2024	13
	A. Profil dan Faktor Risiko	13
	B. Skor Analisis Risiko	16
	C. Matriks Pemetaan Risiko	29
	D. Hasil Pemetaan Risiko Berupa Zonafikasi	49
	1. Zonafikasi Untuk Inspektorat I	49
	2. Zonafikasi Untuk Inspektorat II	51
	3. Zonafikasi Untuk Inspektorat III	53
BAB V	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Objek Pengawasan Intern.....	4
Tabel 2.1 Matriks Pola Pengawasan Zonafikasi.....	11
Tabel 4.1 Penetapan Faktor Risiko di Lingkungan BNN TA. 2023 Untuk Penyusunan PKPT TA 2024.....	14
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Penilaian Analisis Risiko Satuan Kerja di Lingkungan BNN Tahun 2023.....	16
Tabel 4.3 Matriks Pemetaan Risiko Satuan Kerja di Lingkungan BNN.....	29
Tabel 4.4 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat I Tahun 2023....	49
Tabel 4.5 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat II Tahun 2023...	51
Tabel 4.6 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat III Tahun 2023...	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Pengawasan Intern.....	3
---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki semester kedua tahun 2024, Badan Narkotika Nasional mengalami perubahan kebijakan penanganan narkoba dengan menerapkan Intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada 7 Provinsi Rawan yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Intervensi program tersebut memiliki makna akan komitmen Kepala Badan Narkotika Nasional yang menghendaki akselerasi penanganan narkoba di wilayah Indonesia yang bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Adapun komitmen Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut yaitu:

1. Membangun Ketahanan Masyarakat Antinarkoba di Pesisir Pantai Sumatera Utara;
2. Membangun Kekuatan Hukum dan Intelijen Perbatasan Malaysia;
3. Penguatan Media Sosial; dan
4. Pendekatan Rehabilitasi dengan Penggunaan Mobil Keliling

Komitmen tersebut berdampak pada perubahan pada lokus wilayah pengawasan yang sudah tercantum di dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 menjadi 7 Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 50 Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai mandatory Kepala Badan Narkotika Nasional terhitung mulai semester kedua tahun 2024.

Lokus pengawasan yang ditentukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut memiliki implikasi perubahan substansi terhadap Fokus Pengawasan Intern khususnya yang berkaitan erat dengan Fokus Audit Kinerja. Secara mandatory, maka Fokus Audit

Kinerja akan dimaksimalkan menyentuh area pengawasan di 7 Provinsi tersebut guna mendukung dan memberikan penjaminan kualitas serta mutu konseling di dalam pengawasan keefektifan dan keefisienan pencapaian tujuan Badan Narkotika Nasional.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi Inspektorat Utama melakukan penyesuaian Kebijakan Pengawasan Intern yang selanjutnya ditungkan dan didokumentasikan ke dalam Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN TA. 2024 dimaksudkan agar menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN pada tahun anggaran 2024.

2. Tujuan

Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN TA. 2024 bertujuan:

- a. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien di lingkungan BNN;
- b. Meningkatnya efektivitas SPI BNN dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi Pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bagi Inspektur, Kabag Tata Usaha dan Para Auditor serta Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Utama BNN dalam mengimplementasikan kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN pada Tahun Anggaran 2024.

C. Ruang Lingkup

Tidak terdapat perubahan.

D. Tugas Fungsi

Tidak terdapat perubahan.

E. Struktur Organisasi

Tidak terdapat perubahan.

F. Subjek Pengawasan Intern dan Perannya

Tidak terdapat perubahan.

G. Wilayah dan Objek Pengawasan Intern

1. Wilayah Pengawasan Intern

Gambar 1.1 Wilayah Pengawasan Intern



2. Objek Pengawasan Intern

Perubahan Objek Pengawasan Intern kebijakan pengawasan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional pada lokus pengawasan di 7 (tujuh) Provinsi Rawan sesuai dengan komitmen Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

a. Prioritas 1

Objek Pengawasan Intern di Prioritas 1 merupakan satuan kerja (satker) yang ditetapkan oleh Kepala BNN yaitu Provinsi di 7 (tujuh) Daerah Rawan beserta jajaran Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota (BNNK/Kota) di bawahnya ditambah dengan 11 satker Pusat. Satker di Prioritas 1 ini meliputi:

- 1) 11 Satker Pusat;
- 2) 7 Badan Narkotika nasional Provinsi (BNNP) di Daerah Rawan:
 - a) BNNP Aceh;
 - b) BNNP Sumatera Utara;
 - c) BNNP Riau;
 - d) BNNP Kepulauan Riau;
 - e) BNNP Sumatera Selatan;
 - f) BNNP Kalimantan Barat; dan
 - g) BNNP Kalimantan Utara.
- 3) 50 BNNK/Kota.

Tabel 1.1 Objek Pengawasan Intern

No	Satker	No	Satker
1.	BNN Kota Batam	26.	BNN Kabupaten Aceh Selatan
2.	BNN Kota Pekanbaru	27.	BNN Kota Langsa
3.	BNN Kota Dumai	28.	BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara
4.	BNN Kabupaten Pelalawan	29.	BNN Kabupaten Serdang Bedagai
5.	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	30.	BNN Kota Gunungsitoli
6.	BNN Kabupaten Karimun	31.	BNN Kota Tanjung Balai
7.	BNN Kota Tanjung Pinang	32.	BNN Kabupaten Asahan
8.	BNN Kabupaten Pidie Jaya	33.	BNN Kabupaten Batu Bara

No	Satker	No	Satker
9.	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	34.	BNN Kota Pagar Alam
10.	BNN Kota Sabang	35.	BNN Kabupaten Empat Lawang
11.	BNN Kota Lhokseumawe	36.	BNN Kota Lubuklinggau
12.	BNN Kabupaten Mandailing Natal	37.	BNN Kabupaten Bireun
13.	BNN Kabupaten Simalungun	38.	BNN Kabupaten Pidie
14.	BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	39.	BNN Kota Banda Aceh
15.	BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	40.	BNN Kabupaten Karo
16.	BNN Kabupaten Musi Rawas	41.	BNN Kota Binjai
17.	BNN Kabupaten Muara Enim	42.	BNN Kota Tebing Tinggi
18.	BNN Kota Pontianak	43.	BNN Kota Pematang Siantar
19.	BNN Kabupaten Bengkayang	44.	BNN Kabupaten Langkat
20.	BNN Kabupaten Sintang	45.	BNN Kabupaten Deli Serdang
21.	BNN Kabupaten Sanggau	46.	BNN Kota Tarakan
22.	BNN Kabupaten Kubu Raya	47.	BNN Kabupaten Nunukan
23.	BNN Kota Singkawang	48.	BNN Kota Prabumulih

No	Satker	No	Satker
24.	BNN Kabupaten Mempawah	49.	BNN Kabupaten Ogan Ilir
25.	BNN Kabupaten Gayo Luwes	50.	BNN Kabupaten Ogan Komuring Ilir

b. Prioritas 2

Objek Pengawasan Intern di Prioritas 2 merupakan seluruh satker BNNP di luar Prioritas 1 sebanyak 27 BNNP.

c. Prioritas 3

Objek Pengawasan Intern di Prioritas 3 merupakan seluruh satker BNNK/Kota dan Balai/Loka di luar Prioritas 1 sebanyak 123 BNNK/Kota dan 5 Balai/Loka.

Pembagian Objek Pengawasan dijelaskan pada BAB IV.

H. Ketentuan Umum

Tidak terdapat perubahan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Perubahan Kebijakan Pengawasan Intern pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024 akan menyesuaikan Kebijakan KA BNN tentang Program Intervensi P4GN di 7 Provinsi Rawan melalui 4 Komitmen KA BNN yaitu:

1. Membangun Ketahanan Masyarakat Antinarkoba di Pesisir Pantai Sumatera Utara;
2. Membangun Kekuatan Hukum dan Intelijen Perbatasan Malaysia;
3. Penguatan Media Sosial; dan
4. Pendekatan Rehabilitasi dengan Penggunaan Mobil Keliling

Komitmen KA BNN tersebut melahirkan Arah Kebijakan Badan Narkotika Nasional pada 5 Strategi dalam pelaksanaan Indonesia Bersinar sebagai berikut:

1. Penguatan Kolaborasi
Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan P4GN. Disamping itu mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan P4GN di wilayah.
2. Penguatan Intelijen
Pembangunan big data intelijen untuk mendukung kebijakan P4GN (evidence based policy), intensifikasi kegiatan surveillance, peningkatan kapasitas sdm intelijen, dan drugs signature analysis.
3. Penguatan Wilayah Pesisir
Memperkuat ketahanan masyarakat pada wilayah pesisir untuk menangkal masuknya narkoba melalui jalur laut.
4. Penguatan Wilayah Perbatasan
Membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum negara tetangga. Disamping itu untuk menangkal masuknya narkoba ke wilayah indonesia akan dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat pada wilayah perbatasan.

5. Pendekatan Iconic dan Tematik

Penentuan lokus intervensi berdasarkan tingkat kerawanan, pendekatan intervensi berdasarkan data dan kearifan lokal dari masing-masing wilayah rawan.

Berdasarkan penetapan Kebijakan KA BNN tentang Intervensi Program P4GN di 7 Provinsi Rawan, maka secara mandatory Objek Pengawasan merubah zonafikasi menjadi sebagai berikut:

1. Prioritas 1 sebagai Zona Merah yaitu Satker Binaan sebagai Mandatory Kepala Badan Narkotika Nasional,
2. Prioritas 2 sebagai Zona Merah yaitu Satker Binaan sebagai Mandatory Inspektur Utama,
3. Prioritas 3 Zona Kuning yaitu Satker Sentuhan, dan
4. Prioritas 3 Zona Hijau yaitu Satker Pantauan.

Perubahan zonafikasi ini telah disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di semester kedua 2024 serta diharapkan menjadi lebih terarah dan terstruktur untuk menuju konsistensi dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi selain dari membantu tercapainya tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Oleh karena itu, Kebijakan Pengawasan Intern Ittama BNN T.A. 2024 dibagi menjadi 3 (tiga) fundamental Kebijakan yaitu:

A. Mandatory Pengawasan Intern

Merupakan kebijakan pengawasan intern yang menitikberatkan pada pengoptimalan fungsi dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Ittama BNN terhadap Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional dan Kelembagaan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Audit Kinerja;
2. Audit Kinerja atas Aspek Keuangan Tertentu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT);
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);
5. Reviu Laporan Keuangan (LK);

6. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
7. Reviu Laporan Kinerja (LKj);
8. Evaluasi melalui Tim Penilai Mandiri dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP);
9. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Evaluasi melalui Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI);
11. Pemantauan Tindak Lanjut; dan
12. Konsultasi bidang Pengawasan Intern.

B. Penetapan Pola Pengawasan Intern

Perubahan Pola Pengawasan Intern Inspektorat Utama BNN T.A. 2024 didasarkan pada kebijakan BNN atas strategi pelaksanaan kegiatan Indonesia Bersinar dan hasil perhitungan maturitas manajemen risiko yang membagi wilayah atau objek pengawasan ke dalam zonafikasi. Kebijakan perlakuan pengawasan harus dapat menjamin agar wilayah pada zonafikasi tersebut menjadi lebih baik di tahun berikutnya.

1. Prioritas 1 sebagai Zona Merah yaitu Satker Binaan sebagai Mandatori Kepala Badan Narkotika Nasional
Zona Merah/Satker Binaan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa Audit Kinerja Tatap Muka yang terdiri dari:
 - 1) Satker Pusat;
 - 2) Satker Eselon II Mandiri; dan
 - 3) Satker BNN Provinsi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, dan
 - 4) Satker BNN Kabupaten/Kota wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara

Jumlah hari pengawasan dituangkan secara detil pada Program Kerja Audit masing-masing Inspektorat.

2. Prioritas 2 sebagai Zona Merah yaitu Satker Binaan sebagai Mandatory Inspektur Utama

Zona Merah/Satker Binaan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa Audit Kinerja Tatap Muka yang dilaksanakan setelah seluruh satker pada Prioritas 1 telah dikunjungi Audit Tatap Muka. Jika tidak dimungkinkan dari ketersediaan anggaran maka Audit dilakukan secara daring/virtual. Adapun satker pada Prioritas 2 ini merupakan seluruh satker BNN Provinsi yang tidak termasuk di dalam Prioritas 1.

3. Prioritas 3 Zona Kuning yaitu Satker Sentuhan

Zona kuning/Satker sentuhan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa audit atau pengawasan lainnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan lainnya, dilakukan survei pendahuluan/screening terlebih dahulu secara daring/online untuk menentukan apakah terdapat kelemahan SPI dan/atau fraud/penyimpangan sebagai tindakan early warning system.

Apabila hasil survei pendahuluan/screening ditemukan indikasi fraud/penyimpangan maka dapat dilaksanakan kegiatan audit, namun apabila ditemukan kelemahan SPI maka dapat dilaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan audit atau pengawasan lainnya pada zona kuning dapat dilakukan secara online/daring maupun tatap muka selama terdapat ketersediaan anggaran dan pelaksanaannya setelah memenuhi Audit Tatap Muka secara berurutan satker di Prioritas 1 dan 2.

Kegiatan pengawasan pada satker zona kuning diharapkan dapat meningkatkan status satker tersebut menjadi zona hijau.

4. Prioritas 3 Zona Hijau yaitu Satker Pantauan

Zona hijau/Satker sentuhan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa pengawasan lainnya.

Pada zona hijau dilakukan pengawasan lainnya secara online/daring. Pengawasan lainnya tersebut, diantaranya dapat berupa kegiatan konsultasi penyajian pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan, asistensi penyajian profil dan penanganan risiko satker, konsultasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta asistensi pembangunan zona integritas. Kegiatan ini bertujuan agar satker zona hijau tidak berubah menjadi zona kuning atau bahkan merah.

Tabel 2.1 Matriks Pola Pengawasan Zonafikasi

Prioritas	Zonafikasi	Treatment Pengawasan		Ket
		Assurance	Consulting	
Prioritas 1	Zona Merah	Audit Kinerja/Ketaatan – Tatap Muka	Pengawasan Lainnya – virtual/daring	Wajib Mandatory Kepala BNN
Prioritas 2	Zona Merah	Audit Kinerja/Ketaatan – Tatap Muka (optional*)	Pengawasan Lainnya – virtual/daring	Wajib Mandatory Inspektur Utama *dapat dilaksanakan setelah pemenuhan seluruh satker di Prioritas 1 dan jika terdapat ketersediaan anggaran di masing-masing Inspektorat
Prioritas 3	Zona Kuning	Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan virtual/daring	Pengawasan Lainnya – virtual/daring	Non – Mandatory
Prioritas 3	Zona Hijau	Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan virtual/daring	Pengawasan Lainnya – virtual/daring	Non – Mandatory

C. Penetapan Bidang Tugas Koordinator Pengawasan

Tidak ada perubahan

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Tidak terdapat perubahan

BAB IV

PERUBAHAN PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT 2024

A. Profil dan Faktor Risiko

Pada Badan Narkotika Nasional terdapat 241 Unit Pemilik Risiko (UPR), terdiri dari :

1. Eselon II Satker Pusat sebanyak 29 Unit Kerja;
2. BNNP dan BNNK/Kota sebanyak 207 Unit Kerja;
3. Balai/Loka Rehabilitasi sebanyak 5 Unit Kerja.

Sebanyak 241 UPR tersebut terdapat di 223 Satuan Kerja. Basis objek audit adalah Satuan kerja, dengan demikian atas UPR yang terdapat pada level eselon II Satuan Kerja Pusat, pengakuan atas nilai risikonya dihitung sesuai Satuan Kerja Induknya, yakni eselon I.

Faktor Risiko digunakan untuk:

1. menggambarkan faktor-faktor umum yang dapat mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi dan/atau mempengaruhi penentuan prioritas pada suatu bagian dari audit universe. Dalam penyusunan PKPT ini, penggunaan faktor risiko ditujukan untuk penentuan prioritas auditable unit;
2. menyeleksi/meranking auditable unit yang akan menjadi obyek pengawasan. Faktor risiko dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor umum yang dapat mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi dan/atau mempengaruhi prioritas pada suatu bagian dari Peta Auditan.

Faktor Risiko yang digunakan pada penentuan Satker Audit di lingkungan Badan Narkotika Nasional antara lain total anggaran satuan kerja, belanja modal, realisasi anggaran tahun sebelumnya, pelaksanaan audit tahun sebelumnya, waktu penyelesaian rekomendasi hasil audit (internal dan eksternal), jumlah pengaduan masyarakat dan WBS, dan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja.

Berdasarkan rangking tersebut, kemudian memilih risiko mana yang akan dikaitkan dengan Satker layak audit (auditable unit) dalam tahun ini, dan risiko mana yang akan dikaitkan dengan Satker layak audit.

Tabel. 4.1 Penetapan Faktor Risiko
di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
TA. 2023 untuk penyusunan PKPT Tahun 2024

No.	Faktor Risiko	Presentase		Kriteria	Level Risiko	Level Skor	Keterangan
1	Kebijakan Pimpinan	15%	0.94	Satker Pusat / BNNP	Risiko Sangat Tinggi	4	Komiten Ka BNN terhadap 11 Satker Pusat, 7 BNNP, 50 BNNK/Kota
				Balai	Risiko Tinggi	3	
				BNNK/ Loka	Risiko Rendah	2	
				-	Risiko Sangat Rendah	1	
2	Total Anggaran	5.00%	0.31	> 1,8 M	Risiko Sangat Tinggi	4	PAGU indikatif 2024 atau alokasi 2023
				> 1,5 s.d 1,8 M	Risiko Tinggi	3	
				>1,2 s.d 1,5 M	Risiko Rendah	2	
				≤ 1,2 M	Risiko Sangat Rendah	1	
3	Belanja Modal	5.00%	0.31	> 50 jt	Risiko Sangat Tinggi	4	RKAKL 2023
				> 25 - 50 jt	Risiko Tinggi	3	
				>0 - 25 jt	Risiko Rendah	2	
				0	Risiko Sangat Rendah	1	
4	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya (semakin tinggi realisasi semakin beresiko)	5.00%	0.31	>97-100%	Risiko Sangat Tinggi	4	Penyerapan TA. 2022 Keuangan
				>95-97%	Risiko Tinggi	3	
				>92-95%	Risiko Rendah	2	
				≤92%	Risiko Sangat Rendah	1	
5	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya (Ren, Ops, Kinerja, PNBK)	20%	1.25	> 2 Tahun	Risiko Sangat Tinggi	4	Tahun 2023 yang sudah selesai dan direncanakan
				2 Tahun	Risiko Tinggi	3	
				1 Tahun	Risiko Rendah	2	
				Kurang dari 12 Bulan	Risiko Sangat Rendah	1	
6	Waktu Penyelesaian Rekomendasi LHA Jumlah Temuan Eksternal dan Internal	20%	1.25	> 3 Tahun	Risiko Sangat Tinggi	4	Database Tim PTL Karena berpengaruh terhadap ZI
				2 - 3 Tahun	Risiko Tinggi	3	
				1 - 2 Tahun	Risiko Rendah	2	

				0 - 1 Tahun	Risiko Sangat Rendah	1	
7	Jumlah Pengaduan Masyarakat dan WBS	15%	0.94	> 2	Risiko Sangat Tinggi	4	Data Dumas BNN/UPP dan WBS Itsus 2022 dan Tahun berjalan
				2 Pengaduan	Risiko Tinggi	3	
				1 Pengaduan	Risiko Rendah	2	
				Tidak Ada Pengaduan	Risiko Sangat Rendah	1	
8	Pembangunan Zona Integritas	15%	0.94	Belum membangun	Risiko Sangat Tinggi	4	Diluar Kriteria Level 1 s.d 3
				Usulan Satker ZI dari para IR ke Tim TPI	Risiko Tinggi	3	berlaku untuk tahun 2022 s.d 2023
				Telah diajukan ke TPN	Risiko Rendah	2	berlaku untuk tahun sejak 2021
				Mendapatkan Predikat WBK atau WBBM	Risiko Sangat Rendah	1	Selama WBK WBM belum dicabut
			6.25				

B. Skor Analisis Risiko

Dalam metode Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) terdapat perhitungan atas tiga komponen nilai untuk mendapat nilai risiko sebuah Satuan kerja, yakni : Nilai Level Maturitas Manajemen Risiko (MR); Nilai rata-rata Risk Register (RR) yang didapatkan berdasarkan hasil perkalian Rata-Rata Level Kemungkinan dan Rata-Rata Level Dampak pada pemetaan dimasing-masing satker; dan Nilai Faktor Risiko (FR). Penentuan Nilai PIBR didapatkan berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

1. Jika Level MR < 3 Maka: 100%FR
2. Jika Level MR = 3 Maka; (RRx50%)+(FRx50%)
3. Jika Level MR > 3 Maka; (RRx70%)+(FRx30%)

Tabel. 4.2 Hasil Rekapitulasi Penilaian Analisis Risiko

Satuan Kerja di Lingkungan BNN Tahun 2023

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
1	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	21.32	3	22	20.63	3.76	1.24	1.24	0.62	1.25	5	3.76	3.76
2	BNN KABUPATEN DONGGALA	21.03	3	23	19.05	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	5	0.94	3.76
3	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	21.00	3	22	19.99	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	0.94	3.76
4	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	20.97	3	21	20.93	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	1.88	3.76
5	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	20.90	3	24	17.80	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	3.75	0.94	3.76
6	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	20.69	3	22	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
7	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	20.31	3	25	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
8	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	20.22	3	22	18.44	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
9	BNN PROVINSI MALUKU	20.22	3	22	18.43	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	0.94	3.76
10	BNN KABUPATEN SUMENEP	19.78	3	23	16.56	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
11	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	19.78	3	23	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
12	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	19.78	3	23	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
13	BNN KABUPATEN BANYUMAS	19.69	3	25	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	2.82
14	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	19.62	3	23	16.24	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
15	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	19.38	3	25	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
16	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	19.38	3	25	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
17	BNN KABUPATEN BIMA	19.37	2	0	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
18	BNN KOTA PALU	19.37	2	22	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
19	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	19.34	3	24	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
20	BNN KOTA PONTIANAK	19.34	3	24	14.67	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
21	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	19.31	3	23	15.62	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	3.76	1.88
22	BNN KOTA BONTANG	19.31	3	23	15.62	1.88	0.93	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
23	BNN KABUPATEN JAYAPURA	19.31	3	23	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
24	BNN KABUPATEN MIMIKA	19.31	3	23	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
25	BNN KABUPATEN KARO	19.28	3	22	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
26	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	19.19	3	24	14.38	3.76	1.24	0.31	0.62	1.25	2.5	0.94	3.76
27	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	19.19	3	24	14.37	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
28	BNN KOTA BANJARMASIN	19.19	3	24	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
29	BNN KABUPATEN TABALONG	19.16	3	23	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
30	BNN KABUPATEN LUMAJANG	19.15	4	20	17.18	1.88	1.24	0.93	0.93	2.50	5	1.88	2.82
31	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	19.15	4	22	12.49	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	1.88	0.94
32	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	19.12	3	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
33	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	19.12	3	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	5	0.94	3.76
34	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	19.12	3	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	19.06	3	25	13.12	1.88	1.24	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	2.82
36	BNN KABUPATEN KUNINGAN	19.00	3	23	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
37	BNN KOTA TEGAL	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
38	BNN KABUPATEN SINTANG	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
39	BNN KABUPATEN SANGGAU	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
40	BNN KABUPATEN BIREUEN	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
41	BNN KOTA SABANG	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
42	BNN KABUPATEN PIDIE	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
43	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SE	18.81	3	22	15.61	3.76	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	0.94
44	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	18.75	3	25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
45	BNN KOTA MALANG	18.75	3	25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
46	BNN KABUPATEN KENDAL	18.72	3	24	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
47	BNN KABUPATEN BULELENG	18.56	3	24	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
48	BNN KABUPATEN CILACAP	18.56	3	24	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
49	BNN KOTA SAMARINDA	18.53	3	23	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
50	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	18.50	3	22	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
51	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	18.50	3	22	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
52	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	18.40	3	24	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
53	BNN KOTA TANJUNG BALAI	18.40	3	24	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
54	BNN PROVINSI PAPUA	18.38	3	23	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
55	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	18.35	3	22	14.69	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
56	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	18.34	3	22	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	1.88
57	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	18.34	3	22	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
58	BNN KOTA PAGARALAM	18.34	3	22	14.68	1.88	1.24	0.93	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
59	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	18.25	3	24	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
60	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	18.19	3	22	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
61	BNN KABUPATEN KOLAKA	18.19	3	22	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
62	BNN KABUPATEN CIANJUR	18.03	3	22	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
63	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	18.00	3	21	15.00	1.88	0.93	0.31	0.93	5.00	1.25	0.94	3.76
64	BNN KABUPATEN BALANGAN	17.94	3	24	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
65	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	17.91	3	23	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
66	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	17.90	3	23	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
67	BNN PROVINSI JAMBI	17.88	3	22	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
68	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	17.88	3	22	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
69	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
70	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
71	BNN PROVINSI BANTEN	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
72	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
73	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	17.87	3	22	13.74	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
74	BNN KOTA PALANGKARAYA	17.87	3	22	13.74	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
75	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	17.78	3	24	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
76	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	17.75	3	23	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
77	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	17.72	3	22	13.44	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
78	BNN KOTA CILEGON	17.72	3	22	13.43	1.88	1.24	0.62	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
79	BNN KABUPATEN GARUT	17.72	3	22	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
80	BNN KOTA MOJOKERTO	17.59	3	23	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
81	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	17.56	3	22	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
82	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	17.56	3	22	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
83	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	17.56	3	22	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
84	BNN KABUPATEN BANTUL	17.56	3	22	13.11	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
85	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	17.56	3	22	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
86	BNN KOTA TASIKMALAYA	17.50	3	20	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
87	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	17.49	2	0	17.49	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	2.5	0.94	3.76
88	BNN KOTA GORONTALO	17.49	2	12	17.49	1.88	1.24	1.24	0.93	2.50	5	0.94	3.76
89	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.44	3	23	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
90	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	17.44	3	23	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
91	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	17.41	3	22	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
92	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	17.40	3	22	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
93	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	17.40	3	22	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
94	BNN KOTA JAKARTA UTARA	17.40	3	22	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
95	BNN KABUPATEN MAGELANG	17.40	3	22	12.80	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
96	SEKRETARIAT UTAMA	17.37	3	21	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
97	BNN PROVINSI BENGKULU	17.31	3	19	15.62	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	2.5	1.88	2.82
98	BNN KABUPATEN BATANGHARI	17.28	3	23	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
99	BNN KOTA KENDARI	17.28	3	18	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
100	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	17.25	3	22	12.50	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
101	BNN KOTA DENPASAR	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
102	BNN KOTA CIREBON	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
103	BNN KOTA LHKSEUMAWE	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
104	BNN KOTA BANJARBARU	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
105	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
106	BNN KABUPATEN BELU	17.22	3	16	18.43	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	2.82	3.76
107	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	17.09	3	22	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
108	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	16.94	3	22	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
109	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
110	BNN KOTA CIMAHI	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
111	BNN KABUPATEN SUMEDANG	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
112	BNN KABUPATEN MEMPAAH	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
113	BNN KABUPATEN SIDOARJO	16.93	3	22	11.86	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
114	BNN KOTA JAMBI	16.88	3	20	13.75	1.88	0.93	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
115	BNN KOTA PEKANBARU	16.87	3	20	13.74	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
116	BNN KOTA BANDA ACEH	16.78	3	22	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
117	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	16.78	3	22	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
118	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	16.78	3	22	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
119	BNN KABUPATEN BANGKA	16.78	3	22	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
120	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	16.75	3	21	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
121	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	16.75	3	21	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
122	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	16.62	3	22	11.24	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
123	BNN PROVINSI LAMPUNG	16.56	2	24	16.56	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
124	BNN KABUPATEN CIAMIS	16.47	3	22	10.93	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
125	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	16.43	3	21	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
126	BNN KOTA BINJAI	16.34	3	18	14.68	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
127	BNN KABUPATEN LANGKAT	16.25	3	20	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
128	BNN KABUPATEN SLEMAN	16.25	3	20	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
129	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	16.24	2	22	16.24	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
130	BNN KOTA TARAKAN	16.24	2	0	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
131	BNN KABUPATEN MUNA	16.24	2	18	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
132	BNN KOTA TEBING TINGGI	16.24	1	0	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
133	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	16.24	2	18	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
134	BNN KABUPATEN ASAHAN	16.24	2	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
135	BNN KOTA TUAL	16.24	2	22	16.24	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	5	0.94	3.76
136	BNN PROVINSI RIAU	16.19	3	13	19.37	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	1.88	3.76
137	BNN KABUPATEN KARANGASEM	16.19	3	18	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
138	BNN KOTA BENGKULU	16.19	3	18	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
139	BNN KOTA BATU	16.09	3	20	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
140	BNN KABUPATEN PASURUAN	16.03	3	18	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
141	BNN KOTA DUMAI	15.94	3	20	11.88	1.88	0.93	0.31	0.31	2.50	1.25	0.94	3.76
142	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	15.93	2	18	15.93	3.76	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	1.88
143	BNN KABUPATEN SOLOK	15.93	2	22	15.93	1.88	0.93	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
144	BNN KABUPATEN GAYO LUES	15.93	2	22	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
145	BNN PROVINSI JAWA BARAT	15.91	3	19	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
146	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	15.90	3	19	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
147	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	15.78	3	20	11.55	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
148	BNN KABUPATEN BOALEMO	15.62	2	15	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
149	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	15.62	2	23	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
150	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	15.61	2	0	15.61	2.82	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	1.88	0.94
151	BNN KABUPATEN KARAWANG	15.56	3	18	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
152	BNN KABUPATEN GRESIK	15.44	3	19	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
153	BNN PROVINSI BALI	15.43	3	19	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
154	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	15.41	3	18	12.81	1.88	1.24	0.31	0.93	2.50	1.25	0.94	3.76
155	BNN KOTA BANDUNG	15.40	3	18	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
156	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15.40	3	18	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
157	BNN KABUPATEN NGANJUK	15.40	3	18	12.80	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	2.82
158	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	15.31	2	19	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
159	BNN KOTA BAU-BAU	15.31	2	23	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
160	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	15.31	2	0	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
161	BNN KOTA PALOPO	15.30	2	25	15.30	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
162	BNN KABUPATEN NUNUKAN	14.99	2	0	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
163	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	14.99	2	23	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
164	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	14.99	2	22	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
165	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	14.78	3	18	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
166	BNN KOTA PRABUMULIH	14.69	2	0	14.69	1.88	1.24	0.31	0.62	3.75	1.25	1.88	3.76
167	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	14.68	2	0	14.68	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
168	BNN KOTA SURAKARTA	14.37	2	0	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
169	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	14.37	2	24	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
170	BNN KOTA BALIKPAPAN	14.37	2	0	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
171	BNN KABUPATEN BONE	14.37	1	24	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
172	BNN KOTA SAWAHLUNTO	14.37	2	18	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
173	BNN KOTA PAYAKUMBUH	14.37	2	18	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
174	INSPEKTORAT UTAMA	14.34	4	15	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
175	BNN KOTA DEPOK	14.22	3	15	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
176	BNN KOTA BATAM	14.19	3	14	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
177	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIA	14.18	3	14	14.36	3.76	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
178	BNN KABUPATEN TUBAN	14.06	2	0	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
179	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	14.06	2	22	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
180	BNN KABUPATEN BOGOR	14.00	3	18	9.99	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
181	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	13.97	3	12	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	3.76
182	BNN KABUPATEN WAY KANAN	13.75	2	0	13.75	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	1.88	3.76
183	BNN KOTA TANGERANG	13.74	2	0	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
184	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	13.74	2	22	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
185	BNN PROVINSI GORONTALO	13.44	1	0	13.44	3.76	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
186	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH	13.43	2	0	13.43	2.82	1.24	1.24	0.31	3.75	1.25	0.94	1.88
187	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	13.19	3	12	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
188	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	13.12	3	10	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
189	BNN KABUPATEN BATANG	13.11	2	22	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
190	BNN KABUPATEN KARIMUN	13.09	3	14	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
191	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	12.91	3	13	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
192	BNN KOTA KUPANG	12.87	3	12	13.74	1.88	0.93	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
193	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	12.81	2	0	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
194	BNN KABUPATEN SUMBAWA	12.81	2	0	12.81	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
195	BNN KOTA KEDIRI	12.80	2	0	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
196	BNN KABUPATEN BELITUNG	12.80	2	22	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
197	BNN KOTA BITUNG	12.53	3	11	14.05	1.88	1.24	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
198	BNN KOTA YOGYAKARTA	12.49	2	24	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
199	BNN KABUPATEN GIANJAR	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
200	BNN KABUPATEN KEDIRI	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
201	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	12.49	2	24	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
202	BNN KABUPATEN POSO	12.49	2	23	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
203	BNN KOTA SINGKAWANG	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
204	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	12.49	2	0	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
205	BNN KOTA MATARAM	12.49	2	0	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
206	BNN KOTA PANGKAL PINANG	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
207	BNN KOTA SURABAYA	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
208	BNN KOTA TANJUNG PINANG	12.43	3	13	11.86	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	1.88
209	BNN KABUPATEN SUKABUMI	12.18	2	22	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
210	BNN KABUPATEN MALANG	12.18	2	0	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
211	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	12.18	2	24	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
212	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	12.18	2	0	12.18	1.88	0.93	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
213	BNN KABUPATEN MOROWALI	12.18	2	0	12.18	1.88	1.24	1.24	0.62	1.25	1.25	0.94	3.76
214	BNN KOTA MANADO	12.06	3	11	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
215	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	11.94	3	12	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
216	BNN KABUPATEN BLITAR	11.87	2	0	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
217	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	11.87	2	0	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
218	BNN KOTA LANGSA	11.87	2	0	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
219	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	11.86	2	0	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
220	BNN KABUPATEN BATU BARA	11.56	2	22	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
221	BNN KOTA METRO	11.25	2	25	11.25	1.88	0.62	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
222	BNN KABUPATEN BADUNG	10.92	2	0	10.92	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
223	BNN KABUPATEN GORONTALO	10.53	3	7	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

C. Matriks Pemetaan Risiko

Dalam perubahan penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan kebijakan Ka BNN perihal kegiatan pengawasan :

1. Zona merah (binaan)
 - a. Satker mandatory yang masuk kedalam zona merah yaitu Satker Pusat, Satker Eselon II Mandiri, dan BNNP;
 - b. Satker wilayah dengan nilai perhitungan PIBR > 17.
2. Zona kuning (sentuhan) dengan perhitungan nilai Faktor Risiko (FR) > Median nilai FR 14.07 dari skala 25;
3. Zona hijau (pantauan) dengan perhitungan nilai Faktor Risiko (FR) < Median nilai FR 14.06 dari skala 25.

Tabel. 4.3 Matriks Pemetaan Risiko Satuan Kerja di Lingkungan BNN

No	Satker	Status Akhir	Nilai PIBR	Nilai FR	Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
1	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	Binaan	19.31	15.62	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	3.76	1.88
2	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	Binaan	19.19	14.37	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76

3	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	Binaan	19.15	12.49	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	1.88	0.94
4	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT	Binaan	17.44	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
5	SEKRETARIAT UTAMA	Binaan	17.37	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
6	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	Binaan	16.94	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
7	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	Binaan	15.90	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
8	INSPEKTORAT UTAMA	Binaan	14.34	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
9	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	Binaan	12.91	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
10	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	Binaan	12.81	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88

11	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Binaan	11.86	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
12	BNN PROVINSI RIAU	Binaan	16.19	19.37	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	1.88	3.76
13	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Binaan	11.94	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
14	BNN KOTA BATAM	Binaan	14.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
15	BNN KOTA PEKANBARU	Binaan	16.87	13.74	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
16	BNN KOTA DUMAI	Binaan	15.94	11.88	1.88	0.93	0.31	0.31	2.50	1.25	0.94	3.76
17	BNN KABUPATEN PELALAWAN	Binaan	19.06	13.12	1.88	1.24	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	2.82
18	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Binaan	13.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
19	BNN KABUPATEN KARIMUN	Binaan	13.09	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
20	BNN KOTA TANJUNG PINANG	Binaan	12.43	11.86	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	1.88
21	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	Binaan	19.78	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
22	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	Binaan	19.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
23	BNN KOTA SABANG	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
24	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	Binaan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
25	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	Binaan	19.78	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	Binaan	18.50	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
27	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	Binaan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
28	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Binaan	15.31	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
29	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	Binaan	14.99	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
30	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	Binaan	14.68	14.68	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
31	BNN PROVINSI LAMPUNG	Binaan	16.56	16.56	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
32	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
33	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	Binaan	15.78	11.55	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
34	BNN PROVINSI JAWA BARAT	Binaan	15.91	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
35	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
36	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Binaan	17.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
37	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Binaan	19.19	14.38	3.76	1.24	0.31	0.62	1.25	2.5	0.94	3.76
38	BNN PROVINSI BENGKULU	Binaan	17.31	15.62	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	2.5	1.88	2.82
39	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	Binaan	19.38	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

40	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Binaan	18.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
41	BNN KOTA PONTIANAK	Binaan	19.34	14.67	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
42	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	Binaan	19.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
43	BNN KABUPATEN SINTANG	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
44	BNN KABUPATEN SANGGAU	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
45	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	Binaan	18.19	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
46	BNN KOTA SINGKAWANG	Binaan	12.49	12.49	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
47	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	Binaan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
48	BNN KABUPATEN GAYO LUES	Binaan	15.93	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
49	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	Binaan	15.41	12.81	1.88	1.24	0.31	0.93	2.50	1.25	0.94	3.76
50	BNN KOTA LANGSA	Binaan	11.87	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
51	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	Binaan	17.72	13.44	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
52	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	Binaan	17.56	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
53	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	Binaan	17.56	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
54	BNN KOTA TANJUNG BALAI	Binaan	18.40	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
55	BNN KABUPATEN ASAHAN	Binaan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

56	BNN KABUPATEN BATU BARA	Binaan	11.56	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
57	BNN KOTA PAGARALAM	Binaan	18.34	14.68	1.88	1.24	0.93	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
58	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	Binaan	17.87	13.74	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
59	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	Binaan	13.74	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
60	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	Binaan	17.91	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
61	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Binaan	17.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
62	BNN PROVINSI BANTEN	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
63	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Binaan	15.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
64	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Binaan	15.93	15.93	3.76	1.24	0.6ppp 2	1.24	1.25	5	0.94	1.88
65	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Binaan	17.41	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
66	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Binaan	20.22	18.44	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
67	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Binaan	19.38	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
68	BNN PROVINSI MALUKU	Binaan	20.22	18.43	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	0.94	3.76

p69	BNN PROVINSI PAPUA	Binaan	18.38	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
70	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	Binaan	17.88	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
71	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Binaan	19.34	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
72	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Binaan	18.34	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
73	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Binaan	18.34	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	1.88
74	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	Binaan	17.75	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
75	BNN KABUPATEN BIREUEN	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
76	BNN KOTA BANDA ACEH	Binaan	16.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
77	BNN KABUPATEN KARO	Binaan	19.28	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
78	BNN KOTA BINJAI	Binaan	16.34	14.68	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
79	BNN KOTA TEBING TINGGI	Binaan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
80	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	Binaan	17.56	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
81	BNN KABUPATEN LANGKAT	Binaan	16.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
82	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	Binaan	17.56	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
83	BNN KOTA TARAKAN	Binaan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

84	BNN KABUPATEN NUNUKAN	Binaan	14.99	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
85	BNN KOTA PRABUMULIH	Binaan	14.69	14.69	1.88	1.24	0.31	0.62	3.75	1.25	1.88	3.76
86	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	Binaan	14.06	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
87	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Binaan	17.25	12.50	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
88	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	Binaan	18.35	14.69	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
89	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	Binaan	21.32	20.63	3.76	1.24	1.24	0.62	1.25	5	3.76	3.76
90	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	Binaan	18.25	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
91	BNN PROVINSI JAMBI	Binaan	17.88	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
92	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
93	BNN PROVINSI BALI	Binaan	15.43	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
94	BNN PROVINSI GORONTALO	Binaan	13.44	13.44	3.76	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
95	BNN KABUPATEN PIDIE	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
96	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG	Sentuhan	18.81	15.61	3.76	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	0.94
97	BNN KABUPATEN MIMIKA	Sentuhan	19.31	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
98	BNN KABUPATEN BALANGAN	Sentuhan	17.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

99	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	Sentuhan	20.97	20.93	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	1.88	3.76
100	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	Sentuhan	20.90	17.80	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	3.75	0.94	3.76
101	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Sentuhan	19.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	5	0.94	3.76
102	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Sentuhan	19.62	16.24	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
103	BNN KOTA SAMARINDA	Sentuhan	18.53	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
104	BNN KOTA BONTANG	Sentuhan	19.31	15.62	1.88	0.93	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
105	BNN KABUPATEN KUNINGAN	Sentuhan	19.00	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
106	BNN KABUPATEN CIANJUR	Sentuhan	18.03	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
107	BNN KABUPATEN BANYUMAS	Sentuhan	19.69	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	2.82
108	BNN KOTA TEGAL	Sentuhan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
109	BNN KABUPATEN KENDAL	Sentuhan	18.72	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82

110	BNN KABUPATEN CILACAP	Sentuhan	18.56	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
111	BNN KOTA PALANGKARAYA	Sentuhan	17.87	13.74	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
112	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
113	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	Sentuhan	14.99	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
114	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIAU	Sentuhan	14.18	14.36	3.76	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
115	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	Sentuhan	15.31	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
116	BNN KABUPATEN MAGELANG	Sentuhan	17.40	12.80	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
117	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	Sentuhan	16.75	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
118	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	Sentuhan	16.75	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
119	BNN KOTA SURAKARTA	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

120	BNN KABUPATEN GARUT	Sentuhan	17.72	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
121	BNN KOTA TASIKMALAYA	Sentuhan	17.50	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
122	BNN KOTA CIREBON	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
123	BNN KOTA CIMAHI	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
124	BNN KABUPATEN SUMEDANG	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
125	BNN KABUPATEN CIAMIS	Sentuhan	16.47	10.93	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
126	BNN KABUPATEN KARAWANG	Sentuhan	15.56	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
127	BNN KOTA BANDUNG	Sentuhan	15.40	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
128	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	Sentuhan	14.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
129	BNN KOTA DEPOK	Sentuhan	14.22	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
130	BNN KOTA BALIKPAPAN	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

131	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
132	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	Sentuhan	15.61	15.61	2.82	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	1.88	0.94
133	BNN KOTA PALOPO	Sentuhan	15.30	15.30	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
134	BNN KABUPATEN BONE	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
135	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	Sentuhan	17.44	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
136	BNN KABUPATEN BELU	Sentuhan	17.22	18.43	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	2.82	3.76
137	BNN KOTA BENGKULU	Sentuhan	16.19	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
138	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	Sentuhan	18.50	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
139	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	Sentuhan	18.00	15.00	1.88	0.93	0.31	0.93	5.00	1.25	0.94	3.76
140	BNN KABUPATEN BIMA	Sentuhan	19.37	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
141	BNN KOTA BANJARMASIN	Sentuhan	19.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

142	BNN KABUPATEN TABALONG	Sentuhan	19.16	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
143	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Sentuhan	17.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
144	BNN KOTA PALU	Sentuhan	19.37	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
145	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	Sentuhan	18.75	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
146	BNN KABUPATEN DONGGALA	Sentuhan	21.03	19.05	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	5	0.94	3.76
147	BNN KABUPATEN KOLAKA	Sentuhan	18.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
148	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	Sentuhan	21.00	19.99	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	0.94	3.76
149	BNN KABUPATEN JAYAPURA	Sentuhan	19.31	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
150	BNN KABUPATEN SOLOK	Sentuhan	15.93	15.93	1.88	0.93	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
151	BNN KOTA SAWAHLUNTO	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
152	BNN KOTA PAYAKUMBUH	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

153	BNN KABUPATEN BANGKA	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
154	BNN KOTA CILEGON	Sentuhan	17.72	13.43	1.88	1.24	0.62	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
155	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	Sentuhan	16.62	11.24	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
156	BNN KABUPATEN BANTUL	Sentuhan	17.56	13.11	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
157	BNN KABUPATEN SLEMAN	Sentuhan	16.25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
158	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Sentuhan	17.4 9	17.49	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	2.5	0.94	3.76
159	BNN KOTA BANJARBARU	Sentuhan	17.2 5	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
160	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Sentuhan	15.6 2	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
161	BNN KOTA KENDARI	Sentuhan	17.2 8	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
162	BNN KABUPATEN MUNA	Sentuhan	16.2 4	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
163	BNN KOTA BAU-BAU	Sentuhan	15.3 1	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

164	BNN KOTA TUAL	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	5	0.94	3.76
165	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	Sentuhan	20.69	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
166	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Sentuhan	20.31	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
167	BNN KABUPATEN SUMENEP	Sentuhan	19.78	16.56	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
168	BNN KABUPATEN LUMAJANG	Sentuhan	19.15	17.18	1.88	1.24	0.93	0.93	2.50	5	1.88	2.82
169	BNN KOTA MALANG	Sentuhan	18.75	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
170	BNN KABUPATEN BULELENG	Sentuhan	18.56	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
171	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	Sentuhan	17.90	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
172	BNN KOTA MOJOKERTO	Sentuhan	17.59	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
173	BNN KOTA GORONTALO	Sentuhan	17.49	17.49	1.88	1.24	1.24	0.93	2.50	5	0.94	3.76
174	BNN KOTA JAKARTA UTARA	Sentuhan	17.40	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

175	BNN KABUPATEN BATANGHARI	Sentuhan	17.28	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
176	BNN KOTA DENPASAR	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
177	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	Sentuhan	17.09	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
178	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
179	BNN KOTA JAMBI	Sentuhan	16.88	13.75	1.88	0.93	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
180	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
181	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
182	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	Sentuhan	16.43	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
183	BNN KABUPATEN KARANGASEM	Sentuhan	16.19	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
184	BNN KABUPATEN SIDOARJO	Sentuhan	16.93	11.86	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94

185	BNN KOTA BATU	Sentuhan	16.09	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
186	BNN KABUPATEN PASURUAN	Sentuhan	16.03	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
187	BNN KABUPATEN BOALEMO	Sentuhan	15.62	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
188	BNN KABUPATEN GRESIK	Sentuhan	15.44	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
189	BNN KABUPATEN NGANJUK	Sentuhan	15.40	12.80	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	2.82
190	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
191	BNN KABUPATEN BOGOR	Pantauan	14.00	9.99	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
192	BNN KABUPATEN SUKABUMI	Pantauan	12.18	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
193	BNN KABUPATEN BATANG	Pantauan	13.11	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
194	BNN KABUPATEN WAY KANAN	Pantauan	13.75	13.75	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	1.88	3.76
195	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

196	BNN KOTA METRO	Pantauan	11.25	11.25	1.88	0.62	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
197	BNN KOTA KUPANG	Pantauan	12.87	13.74	1.88	0.93	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
198	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH	Pantauan	13.43	13.43	2.82	1.24	1.24	0.31	3.75	1.25	0.94	1.88
199	BNN KABUPATEN BELITUNG	Pantauan	12.80	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
200	BNN KOTA PANGKAL PINANG	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
201	BNN KOTA TANGERANG	Pantauan	13.74	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
202	BNN KOTA YOGYAKARTA	Pantauan	12.49	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
203	BNN KABUPATEN SUMBAWA	Pantauan	12.81	12.81	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
204	BNN KOTA MATARAM	Pantauan	12.49	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
205	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	Pantauan	12.49	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88

206	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Pantauan	12.1 8	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
207	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	Pantauan	11.8 7	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
208	BNN KABUPATEN POSO	Pantauan	12.4 9	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
209	BNN KABUPATEN MOROWALI	Pantauan	12.1 8	12.18	1.88	1.24	1.24	0.62	1.25	1.25	0.94	3.76
210	BNN KOTA BITUNG	Pantauan	12.53	14.05	1.88	1.24	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
211	BNN KABUPATEN GIANYAR	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
212	BNN KABUPATEN KEDIRI	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
213	BNN KABUPATEN TUBAN	Pantauan	14.06	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
214	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Pantauan	13.97	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	3.76
215	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	Pantauan	13.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76p
216	BNN KOTA KEDIRI	Pantauan	12.80	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

217	BNN KOTA SURABAYA	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
218	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	Pantauan	12.18	12.18	1.88	0.93	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
219	BNN KABUPATEN MALANG	Pantauan	12.18	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
220	BNN KOTA MANADO	Pantauan	12.06	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
221	BNN KABUPATEN BLITAR	Pantauan	11.87	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
222	BNN KABUPATEN BADUNG	Pantauan	10.92	10.92	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
223	BNN KABUPATEN GORONTALO	Pantauan	10.53	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

D. Hasil Pemetaan Risiko Berupa Zonafikasi

1. Zonafikasi untuk Inspektorat I

Tabel 4.4 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat I Untuk Tahun 2024

NO	SATKER	N O	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER
1	DEPUTI PEMBERANTASAN	16	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	31	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	46	BNN KABUPATEN CILACAP	61	BNN KABUPATEN CIAMIS	76	BNN KABUPATEN BOGOR
2	DEPUTI REHABILITASI	17	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	32	LOKA REHABILITASI BNN KALIANDA	47	BNN KOTA PALANGKARAY A	62	BNN KABUPATEN KARAWANG	77	BNN KABUPATEN SUKABUMI
3	BALAI BESAR REHABILITASI	18	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	33	BNN KABUPATEN MIMIKA	48	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	63	BNN KOTA BANDUNG	78	BNN KABUPATEN BATANG
4	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	19	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	34	BNN KABUPATEN BALANGAN	49	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	64	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	79	BNN KABUPATEN WAY KANAN
5	BNN PROVINSI RIAU	20	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	35	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	50	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIAU	65	BNN KOTA DEPOK	80	BNN KABUPATEN TANGGAMUS
6	BNN KOTA BATAM	21	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	36	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	51	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	66	BNN KOTA BALIKPAPAN	81	BNN KOTA METRO

7	BNN KOTA PEKANBARU	22	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	37	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	52	BNN KABUPATEN MAGELANG	67	BNN KABUPATEN TANA TORAJA
8	BNN KOTA DUMAI	23	BNN PROVINSI LAMPUNG	38	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	68	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA
9	BNN KABUPATEN PELALAWAN	24	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	39	BNN KOTA SAMARINDA	54	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	69	BNN KOTA PALOPO
10	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	25	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	40	BNN KOTA BONTANG	55	BNN KOTA SURAKARTA	70	BNN KABUPATEN BONE
11	BNN KABUPATEN KARIMUN	26	BNN PROVINSI JAWA BARAT	41	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56	BNN KABUPATEN GARUT	71	BNN KABUPATEN ROTE NDAO
12	BNN KOTA TANJUNG PINANG	27	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	42	BNN KABUPATEN CIANJUR	57	BNN KOTA TASIKMALAYA	72	BNN KABUPATEN BELU
13	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	28	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	43	BNN KABUPATEN BANYUMAS	58	BNN KOTA CIREBON	73	BNN KOTA BENGKULU
14	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	29	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	44	BNN KOTA TEGAL	59	BNN KOTA CIMAHI	74	BNN KOTA KUPANG
15	BNN KOTA SABANG	30	BNN PROVINSI BENGKULU	45	BNN KABUPATEN KENDAL	60	BNN KABUPATEN SUMEDANG	75	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

2. Zonafikasi untuk Inspektorat II

Tabel 4.5 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat II Untuk Tahun 2024

NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER
1	Sekretaris Utama BNN	16	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	31	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	46	BNN KABUPATEN JAYAPURA	61	BNN KOTA TUAL
2	Inspektorat Utama BNN	17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	32	BNN PROVINSI MALUKU	47	BNN KABUPATEN SOLOK	62	BNN KABUPATEN BELITUNG
3	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)	18	BNN KOTA TANJUNG BALAI	33	BNN PROVINSI PAPUA	48	BNN KOTA SAWAHLUNTO	63	BNN KOTA PANGKAL PINANG
4	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	19	BNN KABUPATEN ASAHAN	34	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	49	BNN KOTA PAYAKUMBUH	64	BNN KOTA TANGERANG
5	BNN KOTA PONTIANAK	20	BNN KABUPATEN BATU BARA	35	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	50	BNN KABUPATEN BANGKA	65	BNN KOTA YOGYAKARTA
6	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	21	BNN KOTA PAGARALAM	36	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	51	BNN KOTA CILEGON	66	BNN KABUPATEN SUMBAWA
7	BNN KABUPATEN SINTANG	22	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	37	BNN KABUPATEN BIMA	52	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	67	BNN KOTA MATARAM
8	BNN KABUPATEN SANGGAU	23	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	38	BNN KOTA BANJARMASIN	53	BNN KABUPATEN BANTUL	68	BNN KABUPATEN TANAH LAUT

9	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	24	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	39	BNN KABUPATEN TABALONG	54	BNN KABUPATEN SLEMAN	69	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
10	BNN KOTA SINGKAWANG	25	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	40	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	55	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	70	BNN KABUPATEN BARITO KUALA
11	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	26	BNN PROVINSI BANTEN	41	BNN KOTA PALU	56	BNN KOTA BANJARBARU	71	BNN KABUPATEN POSO
12	BNN KABUPATEN GAYO LUES	27	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	42	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	57	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	72	BNN KABUPATEN MOROWALI
13	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	28	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	43	BNNK DONGGALA	58	BNN KOTA KENDARI		
14	BNN KOTA LANGSA	29	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	44	BNN KABUPATEN KOLAKA	59	BNN KABUPATEN MUNA		
15	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	30	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	45	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	60	BNN KOTA BAU-BAU		

3. Zonafikasi untuk Inspektorat III

Tabel 4.6 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat III Untuk Tahun 2024

NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER
1	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	31	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	46	BNN KOTA JAMBI	61	BNN KOTA BITUNG
2	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	17	BNN KABUPATEN LANGKAT	32	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	47	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	62	BNN KABUPATEN GIANJAR
3	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	33	BNN KABUPATEN SUMENEP	48	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	63	BNN KABUPATEN KEDIRI
4	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	19	BNN KOTA TARAKAN	34	BNN KABUPATEN LUMAJANG	49	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	64	BNN KOTA SURABAYA
5	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	20	BNN KABUPATEN NUNUKAN	35	BNN KOTA MALANG	50	BNN KABUPATEN KARANGASEM	65	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG
6	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	21	BNN KOTA PRABUMULIH	36	BNN KABUPATEN BULELENG	51	BNN KOTA BATU	66	BNN KABUPATEN MALANG
7	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	22	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	37	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	52	BNN KABUPATEN PASURUAN	67	BNN KOTA MANADO
8	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	23	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	38	BNN KOTA MOJOKERTO	53	BNN KABUPATEN BOALEMO	68	BNN KABUPATEN BLITAR

9	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	24	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	39	BNN KOTA GORONTALO	54	BNN KABUPATEN GRESIK	69	BNN KABUPATEN BADUNG
10	BNN KABUPATEN BIREUEN	25	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	40	BNN KOTA JAKARTA UTARA	55	BNN KABUPATEN NGANJUK	70	BNN KABUPATEN GORONTALO
11	BNN KABUPATEN PIDIE	26	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	56	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG		
12	BNN KOTA BANDA ACEH	27	BNN PROVINSI JAMBI	42	BNN KOTA DENPASAR	57	BNN KABUPATEN TUBAN		
13	BNN KABUPATEN KARO	28	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	43	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	58	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW		
14	BNN KOTA BINJAI	29	BNN PROVINSI BALI	44	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	59	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR		
15	BNN KOTA TEBING TINGGI	30	BNN PROVINSI GORONTALO	45	BNN KABUPATEN SIDOARJO	60	BNN KOTA KEDIRI		

BAB V

PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional tahun 2024 diharapkan agar kegiatan pengawasan internal dapat dilaksanakan secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) serta memenuhi kaidah tertib administrasi.

Jakarta, 25 Juni 2024

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
INSPEKTUR UTAMA**



Drs. WAHYONO, M.H., CFA., CGCAE.

TIMELINE PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA BNN PERUBAHAN
T.A. 2024

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/VIK/PR/01/01/2024/BNN
TANGGAL : JUNI 2024

Inspektorat	No	Area Pengawasan	Nilai PIBR	Jenis Pengawasan	Provinsi	Jadwal												Pengendali Mutu/Pengendali Teknis						Tim Auditor						Total Biaya (Rp)	Tim (I/II/III/IV)	Keterangan
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah Orang	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Hari Pelaksanaan Pengawasan	Mulai (Bulan)	Selesai (Bulan)	Jumlah Orang	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Hari Pelaksanaan Pengawasan	Mulai (Bulan)	Selesai (Bulan)			
Inspektorat I	1	3	4	5	6	7												8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	BNNP Riau	16.19	Audit Kinerja	Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	3	Agustus	Agustus	3	Moh Soleman	Auditor Muda	21	Agustus	Agustus	80.319.600	Tim IV	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : Agustus
	2	BNNK Kuansing	13.19	Audit Kinerja	Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	3	Agustus	Agustus	3	Moh. Kawirani	Auditor Pertama	14	Juli	Agustus	60.979.500	Tim III	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	3	BNNK Pelawan	19.06	Audit Kinerja	Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	3	Agustus	Agustus	3	Wasbeka Abie	Auditor Muda	14	Juli	Agustus	60.979.500	Tim III	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	4	BNNK Dumai	15.94	Audit Kinerja	Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	3	Agustus	Agustus	3	B. Sovia	Auditor Muda	14	Juli	Agustus	60.979.500	Tim III	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	5	BNN Kota Pekanbaru	16.87	Audit Kinerja	Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	5	Juli	Juli	4	Meta P	Auditor Muda	14	Juli	Juli	65.357.600	Tim I	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Juli
	6	BNN Kota Tj Pinang	12.43	Audit Kinerja	Kepulauan Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	5	Juli	Juli	4	Pipit Sandra	Auditor Muda	14	Juli	Juli	65.357.600	Tim I	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Juli
	7	BNNK Karimun	13.09	Audit Kinerja	Kepulauan Riau													1	Drs. Ahmad Alwi	Pengendali Mutu	5	Juli	Juli	4	ling Haerudin	Auditor Muda	14	Juli	Juli	65.357.600	Tim I	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Juli
	8	BNNK Musi Rawas	14.99	Audit Kinerja	Sumatera Selatan													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	Juli	Juli	4	Selviana T	Auditor Muda	14	Juli	Agustus	61.625.200	Tim II	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	9	BNNK Muara Enim	14.68	Audit Kinerja	Sumatera Selatan													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	Juli	Juli	4	Ummul	Auditor Muda	14	Juli	Agustus	61.625.200	Tim II	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	10	BNNK Tapanuli Selatan	16.24	Audit Kinerja	Sumatera Utara													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	Agustus	Agustus	4	Ricky T	Auditor Pertama	14	Agustus	Agustus	61.798.800	Tim II	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : Agustus
	11	BNNK Madina	19.78	Audit Kinerja	Sumatera Utara													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	Agustus	Agustus	4	Rizki P	Auditor Pertama	14	Agustus	Agustus	61.798.800	Tim II	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : Agustus
	12	BNNK Simalungun	18.50	Audit Kinerja	Sumatera Utara													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	3	Juli	Juli	3	Moh Soleman	Auditor Muda	14	Juli	Juli	37.639.000	Tim IV	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Juli
	13	BNNK Pidie Jaya	19.78	Audit Kinerja	NAD													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	Agustus	Agustus	4	Dwi Indriyanti	Auditor Muda	13	Agustus	Agustus	61.254.000	Tim I	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : Agustus
	14	BNNK Sabang	18.81	Audit Kinerja	NAD													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	Agustus	Agustus	4	Moh. Kawirani	Auditor Pertama	13	Agustus	Agustus	61.254.000	Tim I	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : Agustus
	15	BNNK Aceh Tamiang	19.12	Audit Kinerja	NAD													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	September	September	3	Sinta Budi H	Auditor Pelaksana	14	Agustus	September	63.679.000	Tim III	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : September
	16	BNNK Lhokseumawe	17.25	Audit Kinerja	NAD													1	Ari Artadhi	Pengendali Teknis	5	September	September	3	B. Sovia	Auditor Muda	14	Agustus	September	63.679.000	Tim III	Perencanaan : Juni Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : September
Inspektorat II	1	BNNP Kalimantan Barat dan BNNK Mempawah	18,40 dan 16,94	Audit Kinerja	Kalimantan Barat													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Astrid Nindy Larasati 2. Inten Pratiwi Pralana 3. Karina Sahla	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	Agustus	September	55.396.800	III	Perencanaan : Agustus Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : September
	2	BNNK Singkawang dan BNNK Kubu Raya	12,49 dan 18,19	Audit Kinerja	Kalimantan Barat													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Astrid Nindy Larasati 2. Inten Pratiwi Pralana 3. Karina Sahla	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	Juli	Agustus	55.396.800	III	Perencanaan : Juli Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	3	BNNK Bengkayang dan BNN Kota Pontianak	19,12 dan 19,34	Audit Kinerja	Kalimantan Barat													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Asti Purwanti 2. Dwi Prayogi 3. Tonggi Mulia P.Pandilang	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	Juli	Agustus	55.396.800	I	Perencanaan : Juli Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	4	BNNK Sintang dan BNNK Sanggau	18,81	Audit Kinerja	Kalimantan Barat													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Yuli Tri Hastuti 2. Muh Wahib Muslim 3. Robby Salwan	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	Juli	Agustus	60.396.800	II	Perencanaan : Juli Pelaksanaan : Agustus Pelaporan : Agustus
	5	BNNK Empat Lawang dan BNNK Lubuk Linggau	17,87 dan 13,74	Audit Kinerja	Sumatera Selatan													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Asti Purwanti 2. Dwi Prayogi 3. Tonggi Mulia P.Pandilang	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	September	Oktober	73.386.600	I	Perencanaan : September Pelaksanaan : Oktober Pelaporan : Oktober
	6	BNNK Labuhan Batu Utara dan BNNK Asahan	17,72 dan 16,24	Audit Kinerja	Sumatera Utara													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Asti Purwanti 2. Dwi Prayogi 3. Tonggi Mulia P.Pandilang	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	Agustus	September	64.390.400	I	Perencanaan : Agustus Pelaksanaan : September Pelaporan : September
	7	BNNK Batu Bara dan BNNK Tanjung Balai	11,56 dan 18,40	Audit Kinerja	Sumatera Utara													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Yuli Tri Hastuti 2. Muh Wahib Muslim 3. Robby Salwan	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	Agustus	September	66.865.400	II	Perencanaan : Agustus Pelaksanaan : September Pelaporan : September
	8	BNNK Langsa dan BNNK Serdang Bedagai	11,87 dan 17,56	Audit Kinerja	Sumatera Utara													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	7	Juli	Oktober	3	1. Astrid Nindy Larasati 2. Inten Pratiwi Pralana 3. Karina Sahla	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	13	September	Oktober	72.410.400	III	Perencanaan : September Pelaksanaan : September Pelaporan : Oktober
	9	BNN Kota Pagar Alam	18,34	Audit Kinerja	Sumatera Selatan													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	4	Juli	Oktober	3	1. Yuli Tri Hastuti 2. Muh Wahib Muslim 3. Robby Salwan	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Juli	Agustus	47.278.800	II	Perencanaan : Juli Pelaksanaan : Juli Pelaporan : Agustus
	10	BNNK Gunung Sitoli	17,56	Audit Kinerja	Sumatera Utara													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	4	Juli	Oktober	3	1. Yuli Tri Hastuti 2. Muh Wahib Muslim 3. Robby Salwan	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	September	Oktober	53.329.200	II	Perencanaan : September Pelaksanaan : Oktober Pelaporan : Oktober
	11	Sekretaris Utama BNN	18,34	Audit Kinerja	DKI Jakarta & Jawa Barat													2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	20	November	November	12	Semua auditor terbagi masing-masing biro		20	Oktober	November	23.063.100	I/III/II	Perencanaan : Oktober Pelaksanaan : November Pelaporan : November

Inspektorat III	12	Inspektorat Utama	18.34	Audit Kinerja	DKI Jakarta															2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	5	November	November	3	1. Dwi Prayogi 2. Asti Purwantini 3. Muh Wahib Muslim 4. Astid Nindya Larasati 5. Inten Pratiwi Pratama 6. Bnly Alfendo 7. Kartika Handayani	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota	5	Oktober	November		Gabungan	Perencanaan : Oktober Pelaksanaan : November Pelaporan : November
	13	PPSDM	17.56	Audit Kinerja	Jawa Barat															2	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si 2. Eko Prasetyo, SE., CFA	1. Pengendali Mutu 2. Pengendali Teknis	5	Oktober	Oktober	3	1. Yuli Tri Hastuti 2. Robby Salfan 3. Inten Pratiwi Pratama 4. Kartika Handayani 5. Tonggi Mulya P. Pandiangan	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	5	Oktober	November	30.209.500	Gabungan	Perencanaan : Oktober Pelaksanaan : Oktober Pelaporan : November
	1	BNNK Pidie	18.81	Audit Kinerja	Aceh															1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	4	Agustus	Agustus	3	1. Satnio Utomo 2. Eva Sugianti 3. Natanya	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	49.800.000	IV	
	2	BNN Kota Banda Aceh	16.78	Audit Kinerja	Aceh															1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	4	Agustus	Agustus	3	1. Ketua Tim 2. P Putri Palupi 3. Hadi Hamdani	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	49.800.000	II	
	3	BNNK Karo	19.28	Audit Kinerja	Sumatera Utara															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	4	Agustus	Agustus	3	1. Gita Rahmatika 2. Olivia Saffri 3. Andrianus Tito	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	46.665.000	I	
	4	BNNK Binjai	16.34	Audit Kinerja	Sumatera Utara															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	4	Agustus	Agustus	4	1. Rita Lestari 2. Bermiando Putba 3. Melani Tri 4. Intan Fahriyah	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	57.861.000	III	
	5	BNN Kota Tebing Tinggi	16.24	Audit Kinerja	Sumatera Utara															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	4	Juli	Juli	4	1. Rita Lestari 2. Bermiando Putba 3. Melani Tri 4. Intan Fahriyah	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Juli	Juli	53.251.500	III	
	6	BNN Kota Pematang Si	17.56	Audit Kinerja	Sumatera Utara															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	4	Juli	Juli	3	1. Satnio Utomo 2. Eva Sugianti 3. Natanya	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Juli	Juli	46.665.000	IV	
	7	BNNK Langkat	16.25	Audit Kinerja	Sumatera Utara															1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	4	Agustus	Agustus	3	1. Nur saffiri 2. P Putri Palupi 3. Hadi Hamdani	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	43.770.410	II	
	8	BNNK Deli Serdang	17.56	Audit Kinerja	Sumatera Utara															1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	3	Agustus	Agustus	3	1. Satnio Utomo 2. Eva Sugianti 3. Natanya	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	46.458.000	IV	
	9	BNNK Tarakan	16.24	Audit Kinerja	Kalimantan Utara															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	3											
	10	BNNK Nunukan	14.99	Audit Kinerja	Kalimantan Utara															1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	4	Juli	Juli	3	1. Gita Rahmatika 2. Olivia Saffri 3. Andrianus Tito	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Juli	Juli	80.552.000	I	
	11	BNNK Prabumulih	14.69	Audit Kinerja	Sumatera Selatan															1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	4											
	12	BNNK Ogan Ilir	14.06	Audit Kinerja	Sumatera Selatan															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	4	Agustus	Agustus	4	1. Rita Lestari 2. Bermiando Putba 3. Melani Tri 4. Intan Fahriyah	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Agustus	Agustus	56.983.000	III	
	12	BNNK Ogan Komering	17.25	Audit Kinerja	Sumatera Selatan															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	4	Juli	Agustus	4	1. Nur saffiri 2. P Putri Palupi 3. Hadi Hamdani	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota	7	Juli	Agustus	46.495.500	II	
	13	Pusat	11.86	Audit Ketaatan	Jawa Barat															1	Mangaradja Hutagaol	Pengendali Mutu	3	September	September	6	1. Gita Rahmatika 2. Olivia Saffri 3. Andrianus Tito 4. Satnio Utomo 5. Eva Sugianti 6. Natanya	1. Ketua Tim 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota	7	September	September	33.298.800	I & IV	
																				1	Elizabeth Julian KS	Pengendali Teknis	3	September	September	6								

TIMELINE PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA BNN

T.A. 2024

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/ /VIKA/PR.01/2024/BNN
TANGGAL : JUNI 2024

Inspektorat	No	Area Pengawasan	Nilai PIBR	Jenis Kegiatan Konsultansi	Tema Konsultansi	Provinsi	Jadwal												Jumlah Hari Pelaksanaan Konsultansi	Jumlah Tim Pengawasan	Nama	Jabatan Organik	Total Biaya (Rp)
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des					
1	2	3	4	5	6	7	8												9	10	11	12	13
Inspektorat I	1	BNNP Sulawesi Selatan	17.40	Sosialisasi	SAKIP & ZI	Sumatera Selatan													3	2 orang	1. Drs. Ahmad Alwi 2. Auditor	1. Inspektur I 2. Auditor	18.157.000
	2	BNNP Jawa Barat	15.91	Sosialisasi	SAKIP & ZI	Jawa Barat													3	2 orang	1. Drs. Ahmad Alwi 2. Auditor	1. Inspektur I 2. Auditor	12.566.000
	3	BNNP Jawa Tengah	15.78	Sosialisasi	SAKIP & ZI	Jawa Tengah													3	2 orang	1. Drs. Ahmad Alwi 2. Auditor	1. Inspektur I 2. Auditor	12.939.600
	4	BNNK Karawang	15.56	Sosialisasi	SAKIP & ZI	Jawa Barat													3	2 orang	1. Drs. Ahmad Alwi 2. Auditor	1. Inspektur I 2. Auditor	10.579.200
Inspektorat II	1	BNNP Sumatera Barat		Monev PBJ dan Monev MR	PBJ dan MR	Sumatera Barat													4	3 orang	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si	Pengendali Mutu	9.493.000
																					2. Asti Purwantini	Anggota Tim	7.087.000
																					3. Tonggi Mulia	Anggota Tim	7.087.000
																							23.667.000
	2	BNNP Bangka Belitung		Monev PBJ dan Monev MR	PBJ dan MR	Bangka Belitung													4	3 orang	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si	Pengendali Mutu	13.255.000
																					2. Yuli Tri Hastuti	Anggota Tim	6.238.000
																					3. Muh Wahib Muslim	Anggota Tim	6.238.000
																							25.731.000
	3	BNNP Banten		Monev PBJ dan Monev MR	PBJ dan MR	Banten													4	3 orang	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si	Pengendali Mutu	13.405.000
																					2. Dwi Prayogi	Anggota Tim	6.359.000
																					3. Karina Sahla	Anggota Tim	6.359.000
																							26.123.000
	4	BNNP DIY		Monev PBJ dan Monev MR	PBJ dan MR	DIY													4	3 orang	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si	Pengendali Mutu	12.995.000
																					2. Eko Prasetyo, SE., CFA	Anggota Tim	6.995.000
																					3. Astrid Nindya Larasati	Anggota Tim	6.995.000
																							26.985.000
Inspektorat III	5	BNNP Kalimantan Barat		Monev PBJ dan Monev MR	PBJ dan MR	Kalimantan Barat													4	3 orang	1. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.Si	Pengendali Mutu	11.032.000
																					2. Robby Safwan	Anggota Tim	6.427.000
																					3. Inten Pratiwi Pratama	Anggota Tim	6.427.000
Inspektorat III	1	BNNK Sidoarjo	16.93	Sosialisasi	UKI & ZI	Jawa Timur													3	3 orang	1. Mangaradja S Hutagaol 2. Auditor 3. Auditor	1. Inspektur III 2. Auditor 3. Auditor	17.205.700
	2	BNNK Mojokerto	17.59	Sosialisasi	UKI & ZI	Jawa Timur													3	3 orang	1. Mangaradja S Hutagaol 2. Auditor 3. Auditor	1. Inspektur III 2. Auditor 3. Auditor	17.205.700
	3	BNN Kota Malang	18.75	Sosialisasi	UKI & ZI	Jawa Timur													3	3 orang	1. Mangaradja S Hutagaol 2. Auditor 3. Auditor	1. Inspektur III 2. Auditor 3. Auditor	17.205.700